



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
37. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
38. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
39. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 15);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 4.549.747.799.016,00
 - b. Berkurang Rp (271.891.639.645,00)
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 4.277.856.159.371,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp 4.602.810.420.991,00
 - b. Berkurang Rp (184.473.289.700,00)
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 4.418.337.131.291,00
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 70.462.621.975,00
 - 2) Bertambah Rp 92.418.349.945,00
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 162.880.971.920,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 17.400.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 22.400.000.000,00
 - Pembiayaan Netto Anggaran Setelah Perubahan Rp 140.480.971.920,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 1.273.814.055.313,00
 - 2) Berkurang Rp (196.140.058.118,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 1.077.673.997.195,00
- b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 2.160.081.302.000,00
 - 2) Berkurang Rp (125.112.713.683,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 2.034.968.588.317,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp 1.115.852.441.703,00
 - 2) Bertambah Rp 49.361.132.156,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp 1.165.213.573.859,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 930.174.733.000,00
 - 2) Berkurang Rp (167.512.663.000,00)
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 762.662.070.000,00

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 74.355.728.650,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (28.653.222.687,00) |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | Rp 45.702.505.963,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.010.975.368,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (664.628.012,00) |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | | Rp 5.346.347.356,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 263.272.618.295,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 690.455.581,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | | Rp 263.963.073.876,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 321.988.718.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 74.742.861.083,00 |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | | Rp 396.731.579.083,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|------------------------------------|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.338.368.057.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (121.558.748.979,00) |
| Jumlah DAU setelah Perubahan | | Rp 1.216.809.308.021,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|------------------------------------|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 499.724.527.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (78.296.825.787,00) |
| Jumlah DAK setelah Perubahan | | Rp 421.427.701.213,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 237.335.200.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 42.649.549.400,00 |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | | Rp 279.984.749.400,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 487.830.973.703,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (6.724.910.244,00) |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda Lainnya setelah Perubahan | | Rp 481.106.063.459,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 390.686.268.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (8.873.427.000,00) |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp 381.812.841.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 00,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 22.309.920.000,00 |
| Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi/ Pemda Lainnya setelah Perubahan | | Rp 22.309.920.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 2.589.019.959.967,00
 - 2) Berkurang Rp (54.581.166.765,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp2.534.438.793.202,00
- b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 2.013.790.461.024,00
 - 2) Berkurang Rp (129.892.122.935,00)
 - Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp1.883.898.338.089,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 1.717.556.997.652,00
 - 2) Berkurang Rp (146.052.035.603,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp1.571.504.962.049,00
- b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 163.442.070.500,00
 - 2) Bertambah Rp 7.918.652.400,00
 - Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 171.360.722.900,00
- c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp 62.059.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 00,00
 - Jumlah Belanja Bansos Setelah Perubahan Rp 62.059.000.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten Kota/Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp 107.728.761.165,00
 - 2) Berkurang Rp (28.100.208.112,00)
 - Jumlah Belanja Bagi hasil Setelah Perubahan Rp 79.628.553.053,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa & Partai Politik
 - 1) Semula Rp 536.138.680.650,00
 - 2) Berkurang Rp (10.911.422.450,00)
 - Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp 525.227.258.200,00
- f. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 2.094.450.000,00
 - 2) Bertambah Rp 122.563.847.000,00
 - Jumlah BTT Setelah Perubahan Rp 124.658.297.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 209.357.244.220,00
 - 2) Bertambah Rp 45.882.087.797,00
 - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 255.239.332.017,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp 1.382.377.511.385,00
 - 2) Berkurang Rp (31.048.631.363,50)
 - Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan Rp 1.351.328.880.021,50

- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|----|----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 422.055.705.419,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (144.725.579.368,50) | |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | | | Rp 277.330.126.050,50 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 70.462.621.975,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 92.418.349.945,00 | |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | | | Rp 162.880.971.920,00 |
- b. Pengeluaran
- | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 17.400.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 5.000.000.000,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | | | Rp 22.400.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).
- | | | | |
|--------------------------------|----|-------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp | 70.462.621.975,00 | |
| b. Bertambah | Rp | 92.418.349.945,00 | |
| Jumlah SiLPA Setelah Perubahan | | | Rp 162.880.971.920,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp | 17.400.000.000,00 | |
| b. Bertambah | Rp | 5.000.000.000,00 | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Setelah Perubahan | | | Rp 22.400.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **13 Nopember 2020**

Pjs. BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **13 Nopember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :
(4/153/2020)



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran I Peraturan Daerah
Nomor : 4 Tahun 2020
Tanggal : 13 Nopember 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	4.549.747.799.016,00	4.277.856.159.371,00	(271.891.639.645,00)	(5,98)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.273.814.055.313,00	1.077.673.997.195,00	(196.140.058.118,00)	(15,40)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	930.174.733.000,00	762.662.070.000,00	(167.512.663.000,00)	(18,01)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	74.355.728.650,00	45.702.505.963,00	(28.653.222.687,00)	(38,54)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.010.975.368,00	5.346.347.356,00	(664.628.012,00)	(11,06)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	263.272.618.295,00	263.963.073.876,00	690.455.581,00	0,26
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.160.081.302.000,00	2.034.968.588.317,00	(125.112.713.683,00)	(5,79)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	321.988.718.000,00	396.731.579.083,00	74.742.861.083,00	23,21
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.338.368.057.000,00	1.216.809.308.021,00	(121.558.748.979,00)	(9,08)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	499.724.527.000,00	421.427.701.213,00	(78.296.825.787,00)	(15,67)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.115.852.441.703,00	1.165.213.573.859,00	49.361.132.156,00	4,42
1.3.1	Pendapatan Hibah	237.335.200.000,00	279.984.749.400,00	42.649.549.400,00	17,97
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	487.830.973.703,00	481.106.063.459,00	(6.724.910.244,00)	(1,38)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	390.686.268.000,00	381.812.841.000,00	(8.873.427.000,00)	(2,27)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	22.309.920.000,00	22.309.920.000,00	0,00
2	BELANJA	4.602.810.420.991,00	4.418.337.131.291,00	(184.473.289.700,00)	(4,01)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.589.019.959.967,00	2.534.438.793.202,00	(54.581.166.765,00)	(2,11)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.717.556.997.652,00	1.571.504.962.049,00	(146.052.035.603,00)	(8,50)
2.1.4	Belanja Hibah	163.442.070.500,00	171.360.722.900,00	7.918.652.400,00	4,84
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	62.059.000.000,00	62.059.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	107.728.761.165,00	79.628.553.053,00	(28.100.208.112,00)	(26,08)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	536.138.680.650,00	525.227.258.200,00	(10.911.422.450,00)	(2,04)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.094.450.000,00	124.658.297.000,00	122.563.847.000,00	5.851,84
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.013.790.461.024,00	1.883.898.338.089,00	(129.892.122.935,00)	(6,45)
2.2.1	Belanja Pegawai	209.357.244.220,00	255.239.332.017,00	45.882.087.797,00	21,92
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.382.377.511.385,00	1.351.328.880.021,50	(31.048.631.363,50)	(2,25)
2.2.3	Belanja Modal	422.055.705.419,00	277.330.126.050,50	(144.725.579.368,50)	(34,29)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.2	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.062.621.975,00)	(140.480.971.920,00)	(87.418.349.945,00)	164,75
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	70.462.621.975,00	162.880.971.920,00	92.418.349.945,00	131,16
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70.462.621.975,00	162.880.971.920,00	92.418.349.945,00	131,16
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.400.000.000,00	22.400.000.000,00	5.000.000.000,00	28,74
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.400.000.000,00	22.400.000.000,00	5.000.000.000,00	28,74
	PEMBIAYAAN NETTO	53.062.621.975,00	140.480.971.920,00	87.418.349.945,00	164,75
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00



Pjs. BUPATI KARAWANG

YERRY YANUAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG													
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI													
TAHUN ANGGARAN 2020													
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
1	2	Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	246.117.533.295,00	245.965.898.045,00	(151.635.250,00)	(0,06)	1.227.801.417.558,00	1.623.570.644.570,00	2.851.372.062.128,00	1.126.983.410.049,00	1.521.701.122.751,00	2.648.684.532.800,00	(202.687.529.328,00)	(7,11)
1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	939.256.071.648,00	410.967.930.415,00	1.350.224.002.063,00	866.715.062.203,00	425.564.008.259,00	1.292.279.070.462,00	(57.944.931.601,00)	(4,29)
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	939.256.071.648,00	410.967.930.415,00	1.350.224.002.063,00	866.715.062.203,00	425.564.008.259,00	1.292.279.070.462,00	(57.944.931.601,00)	(4,29)
1.01 . 1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	939.256.071.648,00	410.967.930.415,00	1.350.224.002.063,00	866.715.062.203,00	425.564.008.259,00	1.292.279.070.462,00	(57.944.931.601,00)	(4,29)
1.02	Kesehatan	242.579.309.295,00	243.758.898.045,00	1.179.588.750,00	0,49	218.210.649.653,00	448.078.678.105,00	666.289.327.758,00	198.718.649.653,00	509.707.108.227,00	708.425.757.880,00	42.136.430.122,00	6,32
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	242.579.309.295,00	243.758.898.045,00	1.179.588.750,00	0,49	218.210.649.653,00	448.078.678.105,00	666.289.327.758,00	198.718.649.653,00	509.707.108.227,00	708.425.757.880,00	42.136.430.122,00	6,32
1.02 . 1.02.01.01	Dinas Kesehatan	700.000.000,00	500.000.000,00	(200.000.000,00)	(28,57)	182.197.995.667,00	154.997.311.490,00	337.195.307.157,00	166.165.995.667,00	227.207.070.548,00	393.373.066.215,00	56.177.759.058,00	16,66
1.02 . 1.02.01.02	RSUD Karawang	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	0,00	0,00	36.012.653.986,00	165.709.620.000,00	201.722.273.986,00	32.552.653.986,00	185.190.295.603,00	217.742.949.589,00	16.020.675.603,00	7,94
1.02 . 1.02.01.03	Puskesmas Adiarsa	1.836.821.600,00	1.518.770.800,00	(318.050.800,00)	(17,32)	0,00	2.616.723.824,00	2.616.723.824,00	0,00	1.708.979.000,00	1.708.979.000,00	(907.744.824,00)	(34,69)
1.02 . 1.02.01.04	Puskesmas Anggadita	563.823.800,00	442.180.000,00	(121.643.800,00)	(21,57)	0,00	1.157.823.800,00	1.157.823.800,00	0,00	507.752.724,00	507.752.724,00	(650.071.076,00)	(56,15)
1.02 . 1.02.01.05	Puskesmas Balongsari	918.000.000,00	857.978.400,00	(60.021.600,00)	(6,54)	0,00	1.554.000.000,00	1.554.000.000,00	0,00	911.843.145,00	911.843.145,00	(642.156.855,00)	(41,32)
1.02 . 1.02.01.06	Puskesmas Batujaya	4.135.169.420,00	3.721.720.400,00	(413.449.020,00)	(10,00)	0,00	7.501.953.630,00	7.501.953.630,00	0,00	4.870.816.913,00	4.870.816.913,00	(2.631.136.717,00)	(35,07)
1.02 . 1.02.01.07	Puskesmas Bayurlor	885.377.326,00	863.978.400,00	(21.398.926,00)	(2,42)	0,00	1.697.601.326,00	1.697.601.326,00	0,00	910.766.134,00	910.766.134,00	(786.835.192,00)	(46,35)
1.02 . 1.02.01.08	Puskesmas Ciampel	1.620.712.300,00	1.537.282.400,00	(83.429.900,00)	(5,15)	0,00	2.614.984.282,00	2.614.984.282,00	0,00	1.847.015.232,00	1.847.015.232,00	(767.969.050,00)	(29,37)
1.02 . 1.02.01.09	Puskesmas Cibuya	2.608.364.302,00	2.639.405.900,00	31.041.598,00	1,19	0,00	3.892.259.521,00	3.892.259.521,00	0,00	3.277.259.521,00	3.277.259.521,00	(615.000.000,00)	(15,80)
1.02 . 1.02.01.10	Puskesmas Cicinde	1.609.114.740,00	1.440.418.800,00	(168.695.940,00)	(10,48)	0,00	2.388.619.421,00	2.388.619.421,00	0,00	1.437.816.081,00	1.437.816.081,00	(950.803.340,00)	(39,81)
1.02 . 1.02.01.11	Puskesmas Cikampek	2.868.479.700,00	2.540.812.000,00	(327.667.700,00)	(11,42)	0,00	4.732.173.081,00	4.732.173.081,00	0,00	3.037.999.977,00	3.037.999.977,00	(1.694.173.104,00)	(35,80)
1.02 . 1.02.01.12	Puskesmas Cikampek Utara	490.659.200,00	431.730.100,00	(58.929.100,00)	(12,01)	0,00	1.173.159.200,00	1.173.159.200,00	0,00	503.159.200,00	503.159.200,00	(670.000.000,00)	(57,11)
1.02 . 1.02.01.13	Puskesmas Cilamaya	2.293.905.300,00	2.195.732.500,00	(98.172.800,00)	(4,28)	0,00	3.256.072.300,00	3.256.072.300,00	0,00	2.313.572.586,00	2.313.572.586,00	(942.499.714,00)	(28,95)
1.02 . 1.02.01.14	Puskesmas Curug	713.201.850,00	592.859.800,00	(120.342.050,00)	(16,87)	0,00	1.396.531.876,00	1.396.531.876,00	0,00	600.177.300,00	600.177.300,00	(796.354.576,00)	(57,02)
1.02 . 1.02.01.15	Puskesmas Gempol	1.179.590.300,00	1.207.334.800,00	27.744.500,00	2,35	0,00	2.084.927.929,00	2.084.927.929,00	0,00	1.491.893.172,00	1.491.893.172,00	(593.034.757,00)	(28,44)
1.02 . 1.02.01.16	Puskesmas Jatisari	2.783.847.000,00	2.555.792.400,00	(228.054.600,00)	(8,19)	0,00	3.689.411.731,00	3.689.411.731,00	0,00	3.416.092.765,00	3.416.092.765,00	(273.318.966,00)	(7,41)
1.02 . 1.02.01.17	Puskesmas Jayakarta	1.456.426.692,00	1.277.767.100,00	(178.659.592,00)	(12,27)	0,00	2.576.931.273,00	2.576.931.273,00	0,00	1.908.941.273,00	1.908.941.273,00	(667.990.000,00)	(25,92)
1.02 . 1.02.01.18	Puskesmas Jomin	893.767.500,00	717.791.800,00	(175.975.700,00)	(19,69)	0,00	1.649.772.612,00	1.649.772.612,00	0,00	758.867.574,00	758.867.574,00	(890.905.038,00)	(54,00)
1.02 . 1.02.01.19	Puskesmas Kalangsari	1.327.180.924,00	1.358.011.050,00	30.830.126,00	2,32	0,00	2.142.836.730,00	2.142.836.730,00	0,00	1.527.836.730,00	1.527.836.730,00	(615.000.000,00)	(28,70)
1.02 . 1.02.01.20	Puskesmas Karawang	1.187.023.200,00	1.039.334.650,00	(147.688.550,00)	(12,44)	0,00	1.982.779.669,00	1.982.779.669,00	0,00	1.215.490.973,00	1.215.490.973,00	(767.288.696,00)	(38,70)
1.02 . 1.02.01.21	Puskesmas Karawang Kulon	631.032.800,00	520.609.400,00	(110.423.400,00)	(17,50)	0,00	1.348.144.352,00	1.348.144.352,00	0,00	504.000.000,00	504.000.000,00	(844.144.352,00)	(62,62)
1.02 . 1.02.01.22	Puskesmas Kertamukti	2.231.483.036,00	1.898.638.500,00	(332.844.536,00)	(14,92)	0,00	1.867.085.000,00	1.867.085.000,00	0,00	1.897.696.000,00	1.897.696.000,00	30.611.000,00	1,64
1.02 . 1.02.01.23	Puskesmas Klari	2.023.131.000,00	1.727.986.000,00	(295.145.000,00)	(14,59)	0,00	3.403.976.881,00	3.403.976.881,00	0,00	2.423.247.170,00	2.423.247.170,00	(980.729.711,00)	(28,81)
1.02 . 1.02.01.24	Puskesmas Kotabaru	1.246.203.350,00	1.242.435.700,00	(3.767.650,00)	(0,30)	0,00	2.004.843.350,00	2.004.843.350,00	0,00	1.322.292.235,00	1.322.292.235,00	(682.551.115,00)	(34,05)
1.02 . 1.02.01.25	Puskesmas Kutamukti	1.388.921.400,00	1.262.017.000,00	(126.904.400,00)	(9,14)	0,00	2.034.785.217,00	2.034.785.217,00	0,00	1.420.635.897,00	1.420.635.897,00	(614.149.320,00)	(30,18)
1.02 . 1.02.01.26	Puskesmas Kutawaluya	1.708.654.600,00	1.444.509.000,00	(264.145.600,00)	(15,46)	0,00	2.567.954.489,00	2.567.954.489,00	0,00	1.663.776.629,00	1.663.776.629,00	(904.177.860,00)	(35,21)
1.02 . 1.02.01.27	Puskesmas Lemah Duhur	1.193.865.700,00	1.027.524.100,00	(166.341.600,00)	(13,93)	0,00	1.779.933.250,00	1.779.933.250,00	0,00	1.106.469.324,00	1.106.469.324,00	(673.463.926,00)	(37,84)
1.02 . 1.02.01.28	Puskesmas Lemahabang	2.646.793.400,00	2.493.280.800,00	(153.512.600,00)	(5,80)	0,00	3.701.915.341,00	3.701.915.341,00	0,00	2.767.293.941,00	2.767.293.941,00	(934.621.400,00)	(25,25)

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
						Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.04 . 2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	9.422.000,00	9.422.000,00	(8.578.000,00)	(47,66)
4.04 . 2.16.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
4.04 . 2.16.01.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
4.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.800.000,00	1.188.800.000,00	0,00	912.039.000,00	912.039.000,00	(276.761.000,00)	(23,28)
4.04 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.800.000,00	1.188.800.000,00	0,00	912.039.000,00	912.039.000,00	(276.761.000,00)	(23,28)
4.04 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.02.01.01	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636.500,00	19.636.500,00	0,00	9.111.500,00	9.111.500,00	(10.525.000,00)	(53,60)
4.04 . 4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636.500,00	19.636.500,00	0,00	9.111.500,00	9.111.500,00	(10.525.000,00)	(53,60)
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.300.916.434.271,00	3.221.985.601.143,00	(78.930.833.128,00)	(2,39)	919.903.473.327,00	7.750.000.000,00	927.653.473.327,00	1.008.484.204.140,00	6.121.659.350,00	1.014.605.863.490,00	86.952.390.163,00	9,37
4.04 . 4.04.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	471.715.200,00	635.933.634,00	164.218.434,00	34,81	48.440.511.012,00	7.750.000.000,00	56.190.511.012,00	45.550.372.987,00	6.121.659.350,00	51.672.032.337,00	(4.518.478.675,00)	(8,04)
4.04 . 4.04.01.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	3.300.444.719.071,00	3.221.349.667.509,00	(79.095.051.562,00)	(2,40)	871.462.962.315,00	0,00	871.462.962.315,00	962.933.831.153,00	0,00	962.933.831.153,00	91.470.868.838,00	10,50
4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	930.174.733.000,00	764.612.070.000,00	(165.562.663.000,00)	(17,80)	51.987.081.112,00	49.779.000.000,00	101.766.081.112,00	43.286.447.962,00	57.329.299.500,00	100.615.747.462,00	(1.150.333.650,00)	(1,13)
4.04 . 4.04.02.01	Badan Pendapatan Daerah	930.174.733.000,00	764.612.070.000,00	(165.562.663.000,00)	(17,80)	51.987.081.112,00	49.779.000.000,00	101.766.081.112,00	43.286.447.962,00	57.329.299.500,00	100.615.747.462,00	(1.150.333.650,00)	(1,13)
4.05	Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302.300.732,00	14.359.069.854,00	25.661.370.586,00	9.513.839.489,00	9.661.110.504,00	19.174.949.993,00	(6.486.420.593,00)	(25,28)
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302.300.732,00	14.359.069.854,00	25.661.370.586,00	9.513.839.489,00	9.661.110.504,00	19.174.949.993,00	(6.486.420.593,00)	(25,28)
4.05 . 4.05.01.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302.300.732,00	14.359.069.854,00	25.661.370.586,00	9.513.839.489,00	9.661.110.504,00	19.174.949.993,00	(6.486.420.593,00)	(25,28)
	JUMLAH	4.549.747.799.016,00	4.277.856.159.371,00	(271.891.639.645,00)	(5,98)	2.589.019.959.967,00	2.013.790.461.024,00	4.602.810.420.991,00	2.534.438.793.202,00	1.883.898.338.089,00	4.418.337.131.291,00	(184.473.289.700,00)	(4,01)



 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020													
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	939.256.071.648,00	417.698.895.215,00	1.356.954.966.863,00	866.715.062.203,00	428.637.854.959,00	1.295.352.917.162,00	(61.602.049.701,00)	(4,54)
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	939.256.071.648,00	410.967.930.415,00	1.350.224.002.063,00	866.715.062.203,00	425.564.008.259,00	1.292.279.070.462,00	(57.944.931.601,00)	(4,29)
2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730.964.800,00	6.730.964.800,00	0,00	3.073.846.700,00	3.073.846.700,00	(3.657.118.100,00)	(54,33)
1.02.01	Dinas Kesehatan	242.579.309.295,00	243.758.898.045,00	1.179.588.750,00	0,49	218.210.649.653,00	448.078.678.105,00	666.289.327.758,00	198.718.649.653,00	509.707.108.227,00	708.425.757.880,00	42.136.430.122,00	6,32
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	242.579.309.295,00	243.758.898.045,00	1.179.588.750,00	0,49	218.210.649.653,00	448.078.678.105,00	666.289.327.758,00	198.718.649.653,00	509.707.108.227,00	708.425.757.880,00	42.136.430.122,00	6,32
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.088.224.000,00	1.872.000.000,00	(1.216.224.000,00)	(39,38)	23.629.488.934,00	532.252.916.000,00	555.882.404.934,00	20.668.815.504,00	392.232.007.205,00	412.900.822.709,00	(142.981.582.225,00)	(25,72)
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.088.224.000,00	1.872.000.000,00	(1.216.224.000,00)	(39,38)	23.629.488.934,00	532.252.916.000,00	555.882.404.934,00	20.668.815.504,00	392.232.007.205,00	412.900.822.709,00	(142.981.582.225,00)	(25,72)
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	15.196.689.760,00	158.806.298.000,00	174.002.987.760,00	13.137.939.760,00	127.854.438.310,00	140.992.378.070,00	(33.010.609.690,00)	(18,97)
1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	15.196.689.760,00	158.806.298.000,00	174.002.987.760,00	13.137.939.760,00	127.854.438.310,00	140.992.378.070,00	(33.010.609.690,00)	(18,97)
1.05.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.492.135,00	3.500.000.000,00	6.745.492.135,00	2.684.842.135,00	1.836.011.200,00	4.520.853.335,00	(2.224.638.800,00)	(32,98)
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.492.135,00	3.500.000.000,00	6.745.492.135,00	2.684.842.135,00	1.836.011.200,00	4.520.853.335,00	(2.224.638.800,00)	(32,98)
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140.860.911,00	18.000.000.000,00	33.140.860.911,00	13.236.860.911,00	17.450.260.000,00	30.687.120.911,00	(2.453.740.000,00)	(7,40)
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140.860.911,00	18.000.000.000,00	33.140.860.911,00	13.236.860.911,00	17.450.260.000,00	30.687.120.911,00	(2.453.740.000,00)	(7,40)
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	250.000.000,00	135.000.000,00	(115.000.000,00)	(46,00)	6.338.955.634,00	9.500.000.000,00	15.838.955.634,00	5.782.255.634,00	9.394.180.700,00	15.176.436.334,00	(662.519.300,00)	(4,18)
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	250.000.000,00	135.000.000,00	(115.000.000,00)	(46,00)	6.338.955.634,00	9.500.000.000,00	15.838.955.634,00	5.782.255.634,00	9.394.180.700,00	15.176.436.334,00	(662.519.300,00)	(4,18)
1.06.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783.208.883,00	9.805.000.000,00	16.588.208.883,00	6.038.984.249,00	10.595.988.200,00	16.634.972.449,00	46.763.566,00	0,28
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783.208.883,00	9.805.000.000,00	16.588.208.883,00	6.038.984.249,00	10.595.988.200,00	16.634.972.449,00	46.763.566,00	0,28
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.200.000.000,00	10.019.393.200,00	(3.180.606.800,00)	(24,10)	12.205.415.726,00	10.000.000.000,00	22.205.415.726,00	11.436.415.726,00	6.313.389.200,00	17.749.804.926,00	(4.455.610.800,00)	(20,07)
2.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	13.200.000.000,00	10.019.393.200,00	(3.180.606.800,00)	(24,10)	12.205.415.726,00	9.712.006.000,00	21.917.421.726,00	11.436.415.726,00	6.302.709.200,00	17.739.124.926,00	(4.178.296.800,00)	(19,06)
3.08	Urusan Pilihan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.994.000,00	287.994.000,00	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	(277.314.000,00)	(96,29)
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.946.653,00	4.410.000.000,00	10.232.946.653,00	4.812.111.404,00	3.088.145.900,00	7.900.257.304,00	(2.332.689.349,00)	(22,80)
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.946.653,00	4.406.900.000,00	10.229.846.653,00	4.812.111.404,00	3.085.045.900,00	7.897.157.304,00	(2.332.689.349,00)	(22,80)
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
2.03.01	Dinas Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.951.932,00	2.000.000.000,00	7.632.951.932,00	5.283.424.432,00	1.513.981.650,00	6.797.406.082,00	(835.545.850,00)	(10,95)
2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.951.932,00	2.000.000.000,00	7.632.951.932,00	5.283.424.432,00	1.513.981.650,00	6.797.406.082,00	(835.545.850,00)	(10,95)
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	10.114.000.000,00	9.349.000.000,00	(765.000.000,00)	(7,56)	10.182.816.513,00	35.000.000.000,00	45.182.816.513,00	9.635.721.134,00	31.736.883.700,00	41.372.604.834,00	(3.810.211.679,00)	(8,43)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	0,00
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721.593.435,00	4.869.000.000,00	13.590.593.435,00	7.605.843.435,00	4.565.478.000,00	12.171.321.435,00	(1.419.272.000,00)	(10,44)
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.891.250,00	580.891.250,00	0,00	600.831.250,00	600.831.250,00	19.940.000,00	3,43
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721.593.435,00	4.068.472.250,00	12.790.065.685,00	7.605.843.435,00	3.755.535.250,00	11.361.378.685,00	(1.428.687.000,00)	(11,17)
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636.500,00	19.636.500,00	0,00	9.111.500,00	9.111.500,00	(10.525.000,00)	(53,60)
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.300.916.434.271,00	3.221.985.601.143,00	(78.930.833.128,00)	(2,39)	919.903.473.327,00	7.750.000.000,00	927.653.473.327,00	1.008.484.204.140,00	6.121.659.350,00	1.014.605.863.490,00	86.952.390.163,00	9,37
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	3.300.916.434.271,00	3.221.985.601.143,00	(78.930.833.128,00)	(2,39)	919.903.473.327,00	7.750.000.000,00	927.653.473.327,00	1.008.484.204.140,00	6.121.659.350,00	1.014.605.863.490,00	86.952.390.163,00	9,37
4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	930.174.733.000,00	764.612.070.000,00	(165.562.663.000,00)	(17,80)	51.987.081.112,00	50.000.000.000,00	101.987.081.112,00	43.286.447.962,00	57.550.299.500,00	100.836.747.462,00	(1.150.333.650,00)	(1,13)
2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000.000,00	221.000.000,00	0,00	221.000.000,00	221.000.000,00	0,00	0,00
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	930.174.733.000,00	764.612.070.000,00	(165.562.663.000,00)	(17,80)	51.987.081.112,00	49.779.000.000,00	101.766.081.112,00	43.286.447.962,00	57.329.299.500,00	100.615.747.462,00	(1.150.333.650,00)	(1,13)
4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302.300.732,00	14.359.069.854,00	25.661.370.586,00	9.513.839.489,00	9.661.110.504,00	19.174.949.993,00	(6.486.420.593,00)	(25,28)
4.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302.300.732,00	14.359.069.854,00	25.661.370.586,00	9.513.839.489,00	9.661.110.504,00	19.174.949.993,00	(6.486.420.593,00)	(25,28)
	JUMLAH	4.549.747.799.016,00	4.277.856.159.371,00	(271.891.639.645,00)	(5,98)	2.589.019.959.967,00	2.013.790.461.024,00	4.602.810.420.991,00	2.534.438.793.202,00	1.883.898.338.089,00	4.418.337.131.291,00	(184.473.289.700,00)	(4,01)





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
				Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	246.117.533.295,00	245.965.898.045,00	(151.635.250,00)	(0,06)	1.227.801.417.558,00	1.623.570.644.570,00	2.851.372.062.128,00	1.126.983.410.049,00	1.521.701.122.751,00	2.648.684.532.800,00	(202.687.529.328,00)	(7,11)
1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	939.256.071.648,00	410.967.930.415,00	1.350.224.002.063,00	866.715.062.203,00	425.564.008.259,00	1.292.279.070.462,00	(57.944.931.601,00)	(4,29)
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	939.256.071.648,00	410.967.930.415,00	1.350.224.002.063,00	866.715.062.203,00	425.564.008.259,00	1.292.279.070.462,00	(57.944.931.601,00)	(4,29)
1.02	Kesehatan	242.579.309.295,00	243.758.898.045,00	1.179.588.750,00	0,49	218.210.649.653,00	448.078.678.105,00	666.289.327.758,00	198.718.649.653,00	509.707.108.227,00	708.425.757.880,00	42.136.430.122,00	6,32
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	242.579.309.295,00	243.758.898.045,00	1.179.588.750,00	0,49	218.210.649.653,00	448.078.678.105,00	666.289.327.758,00	198.718.649.653,00	509.707.108.227,00	708.425.757.880,00	42.136.430.122,00	6,32
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.088.224.000,00	1.872.000.000,00	(1.216.224.000,00)	(39,38)	23.629.488.934,00	532.452.916.000,00	556.082.404.934,00	20.668.815.504,00	392.432.007.205,00	413.100.822.709,00	(142.981.582.225,00)	(25,71)
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.088.224.000,00	1.872.000.000,00	(1.216.224.000,00)	(39,38)	23.629.488.934,00	532.252.916.000,00	555.882.404.934,00	20.668.815.504,00	392.232.007.205,00	412.900.822.709,00	(142.981.582.225,00)	(25,72)
1.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	15.196.689.760,00	158.806.298.000,00	174.002.987.760,00	13.137.939.760,00	127.854.438.310,00	140.992.378.070,00	(33.010.609.690,00)	(18,97)
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	15.196.689.760,00	158.806.298.000,00	174.002.987.760,00	13.137.939.760,00	127.854.438.310,00	140.992.378.070,00	(33.010.609.690,00)	(18,97)
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	250.000.000,00	135.000.000,00	(115.000.000,00)	(46,00)	24.725.308.680,00	53.701.373.250,00	78.426.681.930,00	21.703.958.680,00	51.231.987.150,00	72.935.945.830,00	(5.490.736.100,00)	(7,00)
1.05 . 1.05.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.492.135,00	3.500.000.000,00	6.745.492.135,00	2.684.842.135,00	1.836.011.200,00	4.520.853.335,00	(2.224.638.800,00)	(32,98)
1.05 . 1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140.860.911,00	18.000.000.000,00	33.140.860.911,00	13.236.860.911,00	17.450.260.000,00	30.687.120.911,00	(2.453.740.000,00)	(7,40)
1.05 . 1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	250.000.000,00	135.000.000,00	(115.000.000,00)	(46,00)	6.338.955.634,00	9.500.000.000,00	15.838.955.634,00	5.782.255.634,00	9.394.180.700,00	15.176.436.334,00	(662.519.300,00)	(4,18)
1.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.499.900,00	4.980.499.900,00	0,00	4.562.729.000,00	4.562.729.000,00	(417.770.900,00)	(8,39)
1.05 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.800.600,00	770.800.600,00	0,00	284.094.000,00	284.094.000,00	(486.706.600,00)	(63,14)
1.05 . 4.01.05	Kecamatan Karawang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.764.800,00	1.003.764.800,00	0,00	1.358.976.600,00	1.358.976.600,00	355.211.800,00	35,39
1.05 . 4.01.06	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.445.700,00	477.445.700,00	0,00	413.109.800,00	413.109.800,00	(64.335.900,00)	(13,48)
1.05 . 4.01.07	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.144.000,00	475.144.000,00	0,00	469.985.200,00	469.985.200,00	(5.158.800,00)	(1,09)
1.05 . 4.01.08	Kecamatan Ciampel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.600.000,00	463.600.000,00	0,00	515.108.000,00	515.108.000,00	51.508.000,00	11,11
1.05 . 4.01.09	Kecamatan Klari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.800.000,00	631.800.000,00	0,00	597.468.000,00	597.468.000,00	(34.332.000,00)	(5,43)
1.05 . 4.01.10	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.901.450,00	517.901.450,00	0,00	491.881.450,00	491.881.450,00	(26.020.000,00)	(5,02)
1.05 . 4.01.11	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.345.100,00	584.345.100,00	0,00	577.940.500,00	577.940.500,00	(6.404.600,00)	(1,10)
1.05 . 4.01.12	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.949.150,00	534.949.150,00	0,00	567.415.150,00	567.415.150,00	32.466.000,00	6,07
1.05 . 4.01.13	Kecamatan Tirtajaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.221.750,00	575.221.750,00	0,00	591.193.000,00	591.193.000,00	15.971.250,00	2,78
1.05 . 4.01.14	Kecamatan Pedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.102.400,00	585.102.400,00	0,00	622.416.400,00	622.416.400,00	37.314.000,00	6,38
1.05 . 4.01.15	Kecamatan Cibuyaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.736.250,00	611.736.250,00	0,00	614.387.600,00	614.387.600,00	2.651.350,00	0,43
1.05 . 4.01.16	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.394.550,00	446.394.550,00	0,00	486.304.450,00	486.304.450,00	39.909.900,00	8,94
1.05 . 4.01.17	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.887.700,00	539.887.700,00	0,00	601.181.900,00	601.181.900,00	61.294.200,00	11,35
1.05 . 4.01.18	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.822.300,00	628.822.300,00	0,00	605.287.000,00	605.287.000,00	(23.535.300,00)	(3,74)
1.05 . 4.01.19	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.440.000,00	617.440.000,00	0,00	617.684.000,00	617.684.000,00	244.000,00	0,04
1.05 . 4.01.20	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.167.200,00	481.167.200,00	0,00	538.816.400,00	538.816.400,00	57.649.200,00	11,98

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
				Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.01 . 4.01.16	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.576.503,00	266.307.450,00	3.400.883.953,00	2.855.344.147,00	344.619.550,00	3.199.963.697,00	(200.920.256,00)	(5,91)
4.01 . 4.01.17	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028.176.957,00	268.724.400,00	4.296.901.357,00	3.559.944.601,00	310.618.400,00	3.870.563.001,00	(426.338.356,00)	(9,92)
4.01 . 4.01.18	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.363.500,00	278.476.700,00	4.366.840.200,00	3.983.881.144,00	380.217.000,00	4.364.098.144,00	(2.742.056,00)	(0,06)
4.01 . 4.01.19	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.960.732,00	300.077.000,00	3.723.037.732,00	3.150.228.376,00	375.606.000,00	3.525.834.376,00	(197.203.356,00)	(5,30)
4.01 . 4.01.20	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.893.166,00	320.572.400,00	3.450.465.566,00	2.961.160.810,00	292.175.800,00	3.253.336.610,00	(197.128.956,00)	(5,71)
4.01 . 4.01.21	Kecamatan Telagasari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.044.177,00	265.417.250,00	3.431.461.427,00	2.880.311.821,00	372.466.950,00	3.252.778.771,00	(178.682.656,00)	(5,21)
4.01 . 4.01.22	Kecamatan Rawamerta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.033.033,00	406.040.100,00	3.373.073.133,00	2.863.300.677,00	493.280.100,00	3.356.580.777,00	(16.492.356,00)	(0,49)
4.01 . 4.01.23	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.214.215,00	319.416.700,00	3.655.630.915,00	3.042.231.859,00	411.190.700,00	3.453.422.559,00	(202.208.356,00)	(5,53)
4.01 . 4.01.24	Kecamatan Tempuran	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.802.344,00	285.135.500,00	4.275.937.844,00	3.566.819.988,00	316.945.650,00	3.883.765.638,00	(392.172.206,00)	(9,17)
4.01 . 4.01.25	Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.009.892,00	262.265.500,00	4.126.275.392,00	3.524.259.892,00	258.445.300,00	3.782.705.192,00	(343.570.200,00)	(8,33)
4.01 . 4.01.26	Kecamatan Jayakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.591.874,00	299.186.400,00	3.520.778.274,00	2.943.606.574,00	387.658.400,00	3.331.264.974,00	(189.513.300,00)	(5,38)
4.01 . 4.01.27	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.657.871,00	348.571.800,00	3.489.229.671,00	2.788.175.515,00	389.655.900,00	3.177.831.415,00	(311.398.256,00)	(8,92)
4.01 . 4.01.28	Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.314.903,00	258.800.000,00	3.268.114.903,00	2.921.832.547,00	315.062.000,00	3.236.894.547,00	(31.220.356,00)	(0,96)
4.01 . 4.01.29	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.942.346,00	328.495.200,00	3.596.437.546,00	3.067.459.990,00	317.159.200,00	3.384.619.190,00	(211.818.356,00)	(5,89)
4.01 . 4.01.30	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503.495.536,00	1.095.736.391,00	8.599.231.927,00	7.025.166.151,00	1.415.702.220,00	8.440.868.371,00	(158.363.556,00)	(1,84)
4.01 . 4.01.31	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.957.021,00	329.996.100,00	3.855.953.121,00	3.150.224.665,00	385.235.900,00	3.535.460.565,00	(320.492.556,00)	(8,31)
4.01 . 4.01.32	Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.197.709,00	274.740.000,00	3.488.937.709,00	2.960.965.353,00	295.420.050,00	3.256.385.403,00	(232.552.306,00)	(6,67)
4.01 . 4.01.33	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.602.640,00	287.204.600,00	3.172.807.240,00	2.665.852.640,00	331.256.300,00	2.997.108.940,00	(175.698.300,00)	(5,54)
4.01 . 4.01.34	Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.395.044,00	263.460.100,00	3.345.855.144,00	2.755.262.688,00	362.670.000,00	3.117.932.688,00	(227.922.456,00)	(6,81)
4.02	Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177.714.986,00	8.467.029.000,00	21.644.743.986,00	12.861.069.724,00	8.447.598.000,00	21.308.667.724,00	(336.076.262,00)	(1,55)
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177.714.986,00	8.467.029.000,00	21.644.743.986,00	12.861.069.724,00	8.447.598.000,00	21.308.667.724,00	(336.076.262,00)	(1,55)
4.03	Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721.593.435,00	4.068.472.250,00	12.790.065.685,00	7.605.843.435,00	3.755.535.250,00	11.361.378.685,00	(1.428.687.000,00)	(11,17)
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721.593.435,00	4.068.472.250,00	12.790.065.685,00	7.605.843.435,00	3.755.535.250,00	11.361.378.685,00	(1.428.687.000,00)	(11,17)
4.04	Keuangan	4.231.091.167.271,00	3.986.597.671.143,00	(244.493.496.128,00)	(5,78)	971.890.554.439,00	58.807.076.500,00	1.030.697.630.939,00	1.051.770.652.102,00	64.423.171.350,00	1.116.193.823.452,00	85.496.192.513,00	8,29
4.04 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
4.04 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.04 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	9.422.000,00	9.422.000,00	(8.578.000,00)	(47,66)
4.04 . 2.16.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
4.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.800.000,00	1.188.800.000,00	0,00	912.039.000,00	912.039.000,00	(276.761.000,00)	(23,28)
4.04 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636.500,00	19.636.500,00	0,00	9.111.500,00	9.111.500,00	(10.525.000,00)	(53,60)
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.300.916.434.271,00	3.221.985.601.143,00	(78.930.833.128,00)	(2,39)	919.903.473.327,00	7.750.000.000,00	927.653.473.327,00	1.008.484.204.140,00	6.121.659.350,00	1.014.605.863.490,00	86.952.390.163,00	9,37
4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	930.174.733.000,00	764.612.070.000,00	(165.562.663.000,00)	(17,80)	51.987.081.112,00	49.779.000.000,00	101.766.081.112,00	43.286.447.962,00	57.329.299.500,00	100.615.747.462,00	(1.150.333.650,00)	(1,13)
4.05	Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302.300.732,00	14.359.069.854,00	25.661.370.586,00	9.513.839.489,00	9.661.110.504,00	19.174.949.993,00	(6.486.420.593,00)	(25,28)
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302.300.732,00	14.359.069.854,00	25.661.370.586,00	9.513.839.489,00	9.661.110.504,00	19.174.949.993,00	(6.486.420.593,00)	(25,28)
	JUMLAH	4.549.747.799.016,00	4.277.856.159.371,00	(271.891.639.645,00)	(5,98)	2.589.019.959.967,00	2.013.790.461.024,00	4.602.810.420.991,00	2.534.438.793.202,00	1.883.898.338.089,00	4.418.337.131.291,00	(184.473.289.700,00)	(4,01)



 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN APBD) RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI, DAN JENIS TAHUN ANGGARAN 2020													
FUNGSI	URUSAN	Organisasi/ SKPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG								BELANJA LANGSUNG		
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA BAGI HASIL	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	BELANJA TIDAK TERDUGA	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PELAYANAN UMUM			310.641.760.709,00		0,00	171.360.722.900,00	62.059.000.000,00	79.628.553.053,00	525.227.258.200,00	124.658.297.000,00	925.021.000,00	197.178.327.888,90	16.611.014.754,00
	2.03 Pangan	Dinas Pangan	5.283.424.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.981.650,00	0,00
	2.10 Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.863.831.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892.583.150,00	802.730.000,00
		Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.480.000,00
		Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.802.600,00	0,00
		Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000.000,00	0,00
	2.14 Statistik	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.200.000,00	0,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.831.250,00	0,00
	2.15 Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	115.853.240,00	46.545.650,00
	2.18 Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.309.800,00	81.779.800,00
		Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.943.000,00	0,00
		Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862.000,00	0,00
	4.01 Administrasi Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.375.000,00	0,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.009.300,00	6.940.200,00
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34.765.345.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.862.198.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	32.092.847.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	54.951.072.200,00	8.595.281.350,00
		Sekretariat DPRD	8.463.550.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.278.544.080,00	310.000.000,00
		Kecamatan Karawang Barat	11.281.839.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.122.998,90	281.840.400,00

FUNGSI	URUSAN	Organisasi/ SKPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG								BELANJA LANGSUNG		
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA BAGI HASIL	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	BELANJA TIDAK TERDUGA	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
		Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.336.000,00	0,00
		Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
		Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
		Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281.500,00	0,00
		Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.968.996.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.998.000,00	13.251.845.250,00	1.056.369.200,00
		Kecamatan Klari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	0,00
		Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	JUMLAH		1.571.504.962.049,00	0,00	0,00	171.360.722.900,00	62.059.000.000,00	79.628.553.053,00	525.227.258.200,00	124.658.297.000,00	255.239.332.017,00	1.351.328.880.021,50	277.330.126.050,50



Pjs. BUPATI KARAWANG

YERRY YANUAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	90.000.000,00	13.928.083.150,00	340.986.704,00	14.359.069.854,00	0,00	6.787.401.400,00	2.873.709.104,00	9.661.110.504,00	(4.697.959.350,00)	(32,72)
4.05	Kepegawaian	90.000.000,00	13.928.083.150,00	340.986.704,00	14.359.069.854,00	0,00	6.787.401.400,00	2.873.709.104,00	9.661.110.504,00	(4.697.959.350,00)	(32,72)
4.05.4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	90.000.000,00	13.928.083.150,00	340.986.704,00	14.359.069.854,00	0,00	6.787.401.400,00	2.873.709.104,00	9.661.110.504,00	(4.697.959.350,00)	(32,72)
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	1.748.217.700,00	73.257.900,00	1.821.475.600,00	0,00	2.006.370.100,00	19.589.100,00	2.025.959.200,00	204.483.600,00	11,23
4.05.4.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	386.597.000,00	0,00	386.597.000,00	0,00	677.189.400,00	0,00	677.189.400,00	290.592.400,00	75,17
4.05.4.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	269.258.100,00	0,00	269.258.100,00	0,00	269.258.100,00	0,00	269.258.100,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	149.036.900,00	0,00	149.036.900,00	0,00	125.978.100,00	0,00	125.978.100,00	(23.058.800,00)	(15,47)
4.05.4.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	35.695.750,00	0,00	35.695.750,00	0,00	55.695.750,00	0,00	55.695.750,00	20.000.000,00	56,03
4.05.4.05.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	0,00	73.257.900,00	73.257.900,00	0,00	53.668.800,00	19.589.100,00	73.257.900,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	60.400.000,00	0,00	60.400.000,00	0,00	60.400.000,00	0,00	60.400.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	158.914.950,00	0,00	158.914.950,00	0,00	158.914.950,00	0,00	158.914.950,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	200.665.000,00	0,00	200.665.000,00	0,00	67.265.000,00	0,00	67.265.000,00	(133.400.000,00)	(66,48)
4.05.4.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	0,00	18.150.000,00	0,00	18.150.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(10.650.000,00)	(58,68)
4.05.4.05.01.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	0,00	469.500.000,00	0,00	469.500.000,00	0,00	530.500.000,00	0,00	530.500.000,00	61.000.000,00	12,99
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	652.212.500,00	267.728.804,00	919.941.304,00	0,00	799.163.300,00	2.854.120.004,00	3.653.283.304,00	2.733.342.000,00	297,12
4.05.4.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	145.308.004,00	145.308.004,00	0,00	0,00	572.730.904,00	572.730.904,00	427.422.900,00	294,15
4.05.4.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	102.900.000,00	102.900.000,00	0,00	0,00	1.066.495.400,00	1.066.495.400,00	963.595.400,00	936,44
4.05.4.05.01.02.10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	19.520.800,00	19.520.800,00	0,00	0,00	1.214.893.700,00	1.214.893.700,00	1.195.372.900,00	6.123,59
4.05.4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	144.334.800,00	0,00	144.334.800,00	0,00	336.275.800,00	0,00	336.275.800,00	191.941.000,00	132,98
4.05.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	373.727.700,00	0,00	373.727.700,00	0,00	340.527.500,00	0,00	340.527.500,00	(33.200.200,00)	(8,88)
4.05.4.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	83.800.000,00	0,00	83.800.000,00	0,00	65.900.000,00	0,00	65.900.000,00	(17.900.000,00)	(21,36)
4.05.4.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	50.350.000,00	0,00	50.350.000,00	0,00	56.460.000,00	0,00	56.460.000,00	6.110.000,00	12,14
4.05.4.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	75.098.000,00	0,00	75.098.000,00	0,00	12.421.500,00	0,00	12.421.500,00	(62.676.500,00)	(83,46)
4.05.4.05.01.03.14	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	0,00	19.158.000,00	0,00	19.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.158.000,00)	(100,00)
4.05.4.05.01.03.15	Penrosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen	0,00	39.265.000,00	0,00	39.265.000,00	0,00	12.421.500,00	0,00	12.421.500,00	(26.843.500,00)	(68,36)
4.05.4.05.01.03.16	Penerapan Sistem Absensi Elektronik	0,00	16.675.000,00	0,00	16.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.675.000,00)	(100,00)
4.05.4.05.01.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	0,00	301.529.850,00	0,00	301.529.850,00	0,00	333.235.950,00	0,00	333.235.950,00	31.706.100,00	10,52
4.05.4.05.01.04.05	Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS	0,00	25.289.900,00	0,00	25.289.900,00	0,00	18.766.900,00	0,00	18.766.900,00	(6.523.000,00)	(25,79)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH		
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
4.05 . 4.05.01 . 16 . 07	Kegiatan Seleksi Administratif Diklat Teknis, Fungsional, Substantif, Non Diklat dan Diklat Prajabatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 08	kegiatan seleksi administrasi calon peserta diklat kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.01 . 17	Program Pengembangan Sitem Diklat	0,00	36.410.000,00	0,00	36.410.000,00	0,00	52.064.500,00	0,00	52.064.500,00	15.654.500,00	43,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Diklat	0,00	36.410.000,00	0,00	36.410.000,00	0,00	52.064.500,00	0,00	52.064.500,00	15.654.500,00	43,00
	JUMLAH	90.000.000,00	13.928.083.150,00	340.986.704,00	14.359.069.854,00	0,00	6.787.401.400,00	2.873.709.104,00	9.661.110.504,00	(4.697.959.350,00)	(32,72)


Pjs. BUPATI KARAWANG
YERRY YANUAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05.4.05.01.00.00.5	BELANJA	25.661.370.586,00	19.174.949.993,00	(6.486.420.593,00)	(25,28)	
4.05.4.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.302.300.732,00	9.513.839.489,00	(1.788.461.243,00)	(15,82)	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	11.302.300.732,00	9.513.839.489,00	(1.788.461.243,00)	(15,82)	
4.05.4.05.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	14.359.069.854,00	9.661.110.504,00	(4.697.959.350,00)	(32,72)	
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.821.475.600,00	2.025.959.200,00	204.483.600,00	11,23	
4.05.4.05.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	386.597.000,00	677.189.400,00	290.592.400,00	75,17	
4.05.4.05.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	386.597.000,00	677.189.400,00	290.592.400,00	75,17	
4.05.4.05.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	269.258.100,00	269.258.100,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.258.100,00	269.258.100,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	149.036.900,00	125.978.100,00	(23.058.800,00)	(15,47)	
4.05.4.05.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.036.900,00	125.978.100,00	(23.058.800,00)	(15,47)	
4.05.4.05.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	35.695.750,00	55.695.750,00	20.000.000,00	56,03	
4.05.4.05.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.695.750,00	55.695.750,00	20.000.000,00	56,03	
4.05.4.05.01.01.14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	73.257.900,00	73.257.900,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	53.668.800,00	53.668.800,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.14.5.2.3	Belanja Modal	73.257.900,00	19.589.100,00	(53.668.800,00)	(73,26)	
4.05.4.05.01.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	158.914.950,00	158.914.950,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Diklat	36.410.000,00	52.064.500,00	15.654.500,00	43,00	
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.410.000,00	52.064.500,00	15.654.500,00	43,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.661.370.586,00)	(19.174.949.993,00)	6.486.420.593,00	(25,28)	



LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020
 Nomor : 4 Tahun 2020
 Tanggal : 13 November 2020

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN 2020

Golongan/Ruang	Eselon				Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	Fungsional		
					Tertentu	Umum	
Golongan IV/e	-	-	-	-	2	-	2
Golongan IV/d	-	1	-	-	6	-	7
Golongan IV/c	-	24	-	-	48	-	72
Golongan IV/b	-	1	61	2	1.674	-	1.738
Golongan IV/a	-	-	108	64	1.923	8	2.103
Jumlah Golongan IV	-	26	169	66	3.653	8	3.922
Golongan IIII/d	-	-	32	337	1.030	59	1.458
Golongan IIII/c	-	-	-	240	1.008	105	1.353
Golongan IIII/b	-	-	-	100	951	386	1.437
Golongan IIII/a	-	-	-	24	359	518	901
Jumlah Golongan IIII	-	-	32	701	3.348	1.068	5.149
Golongan II/d	-	-	-	-	187	300	487
Golongan II/c	-	-	-	-	115	317	432
Golongan II/b	-	-	-	-	29	210	239
Golongan II/a	-	-	-	-	11	75	86
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	342	902	1.244
Golongan I/d	-	-	-	-	-	27	27
Golongan I/c	-	-	-	-	-	12	12
Golongan I/b	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	41	41
Total	-	26	201	767	7.343	2.019	10.356

Pjs BUPATI KARAWANG,



YERRY YANUAR

Lampiran VII.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor : 4 Tahun 2020

Tanggal : 13 November 2020

KABUPATEN KARAWANG
NERACA
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Ref	2019	2018
ASET	4.5.1		
ASET LANCAR	4.5.1.1		
Kas di Kas Daerah	4.5.1.1.1.1	120.300.509.248,00	136.443.542.309,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.5.1.1.1.2	320.000,00	197.685.948,00
Kas di Bendahara Penerimaan	4.5.1.1.1.3	-	62.771.509,00
Kas di BLUD	4.5.1.1.1.4	32.926.509.387,77	31.764.289.060,82
Kas Lainnya	4.5.1.1.1.5	9.653.633.284,00	485.822.938,00
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak	4.5.1.1.2.1	575.150.347.197,80	538.192.055.856,80
Penyisihan Piutang Pajak		-408.643.126.638,22	-381.119.528.799,83
Piutang Pajak Netto		166.507.220.559,58	157.072.527.056,97
Piutang Retribusi	4.5.1.1.2.2	1.965.427.546,40	1.707.743.667,00
Penyisihan Piutang Retribusi		-1.031.813.571,26	-830.402.566,50
Piutang Retribusi Netto		933.613.975,14	877.341.100,50
Piutang Lainnya	4.5.1.1.2.3	94.697.210.219,87	61.185.759.313,47
Penyisihan Piutang Lainnya		-23.259.112.559,16	-8.894.207.503,40
Piutang lainnya Netto		71.438.097.660,71	52.291.551.810,07
Belanja Dibayar Dimuka	4.5.1.1.4	489.865.939,27	510.703.408,88
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	4.5.1.1.3	2.013.437.229,00	1.173.708.270,67
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		2.013.437.229,00	1.173.708.270,67
Persediaan	4.5.1.1.5	41.544.940.487,36	55.010.736.202,43
Jumlah Aset Lancar		445.808.147.770,83	435.890.679.614,34
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Nonpermanen			
Pinjaman Jangka Panjang		-	-
Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-
Investasi Nonpermanen Lainnya	4.5.1.2.1	12.578.081.501,35	12.459.145.449,35
Penyisihan Investasi Non Permanen		-7.662.437.075,00	-7.830.808.670,00
Jumlah Investasi Nonpermanen		4.915.644.426,35	4.628.336.779,35
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.5.1.2.2	130.135.477.226,96	101.701.867.870,55
Investasi Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		130.135.477.226,96	101.701.867.870,55
Jumlah Investasi Jangka Panjang		135.051.121.653,31	106.330.204.649,90
ASET TETAP	4.5.1.3		
Tanah	4.5.1.3.1	1.412.831.994.343,20	1.206.040.960.096,20
Peralatan dan Mesin	4.5.1.3.2	888.866.555.457,87	905.322.101.726,27
Gedung dan Bangunan	4.5.1.3.3	1.764.164.318.547,13	1.509.203.256.511,63
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.5.1.3.4	3.365.354.945.326,07	3.172.329.807.689,07
Aset Tetap Lainnya	4.5.1.3.5	85.487.777.357,71	99.954.082.746,70
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.5.1.3.6	72.070.376.709,00	127.112.609.050,00
Akumulasi Penyusutan	4.5.1.3.7	-3.116.157.141.314,49	-2.889.331.057.212,22
Jumlah Aset Tetap		4.472.618.826.426,49	4.130.631.760.607,65

Uraian	Ref	2019	2018
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	4.5.1.4		
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
Tuntutan Ganti Rugi	4.5.1.4.1	-	112.559.958,33
PenyisihanTuntutan Ganti Rugi		-	-
Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	112.559.958,33
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.5.1.4.2	55.929.730.159,00	34.501.646.159,00
Aset Tak Berwujud	4.5.1.4.3	13.908.324.802,00	17.522.904.052,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		-10.204.656.414,25	-8.740.946.442,50
Aset Tak Berwujud Netto		3.703.668.387,75	8.781.957.609,50
Aset Lain-Lain	4.5.1.4.4	241.245.923.063,80	116.700.784.061,66
Jumlah Aset Lainnya		300.879.321.610,55	160.096.947.788,49
JUMLAH ASET		5.354.357.417.461,18	4.832.949.592.660,38
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.5.2		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.5.2.1	-	8.851.248,00
Utang Bunga		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4.5.2.1.1	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	4.5.2.1.2	13.419.747.030,78	13.324.150.746,93
Utang Belanja	4.5.2.1.3	12.947.573.416,00	10.359.668.273,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.5.2.1.4	36.917.645.983,39	52.872.124.100,23
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		63.284.966.430,17	76.564.794.368,16
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		63.284.966.430,17	76.564.794.368,16
JUMLAH EKUITAS	4.5.3	5.291.072.451.031,01	4.756.384.798.292,22
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.354.357.417.461,18	4.832.949.592.660,38

Pjs. BUPATI KARAWANG,



YERRY YANUAR

Lampiran VII.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor : 4 Tahun 2020

Tanggal : 13 November 2020

KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	Ref	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.6.1		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		992.374.452.913,00	807.639.206.642,00
Penerimaan Retribusi Daerah		69.020.343.168,00	74.229.151.403,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.261.152.768,00	5.144.443.726,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		287.230.417.461,25	282.202.359.424,82
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		164.053.668.705,00	210.865.030.191,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		140.470.470.900,00	100.907.470.582,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.325.136.134.000,00	1.245.521.327.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		509.130.982.037,00	491.491.861.535,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus			
Penerimaan Dana Penyesuaian		396.177.256.880,00	306.698.448.400,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		440.764.037.891,00	398.404.339.403,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		79.793.176.750,00	23.521.019.628,00
Penerimaan Hibah		267.015.520.000,00	240.772.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat			
Penerimaan Lainnya			
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		71.339.985,00	621.219.822,00
Jumlah Arus Masuk Kas		4.678.498.953.458,25	4.188.017.877.756,82
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		1.710.536.396.878,00	1.621.732.170.390,00
Pembayaran Barang		1.478.890.125.643,30	1.420.921.058.751,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		67.210.609.468,00	47.712.096.365,00
Pembayaran Bantuan Sosial		38.713.000.000,00	25.561.200.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		517.632.096.025,00	441.697.433.105,00
Pembayaran Tak Terduga		-	807.070.100,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		139.371.525.000,00	47.563.641.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		17.389.212.000,00	11.669.352.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		3.969.742.965.014,30	3.617.664.022.711,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		708.755.988.443,95	570.353.855.045,82
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	4.6.2		
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan			
Penjualan atas Tanah			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin			
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		71.666.600,00	354.100.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Penjualan Aset Tetap			
Penjualan Aset Lainnya		361.850.000,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		433.516.600,00	354.100.000,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan			
Perolehan Tanah		5.350.288.500,00	19.377.347.800,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		150.699.843.213,00	97.215.835.048,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		251.737.666.643,00	234.824.020.329,00

URAIAN	Ref	2019	2018
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.6.3	276.742.284.873,00	329.682.831.724,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		18.672.920.412,00	16.503.231.342,00
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		12.000.000.000,00	14.836.056.700,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		715.203.003.641,00	712.439.322.943,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-714.769.487.041,00	-712.085.222.943,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan			
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran	4.6.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		261.756.973.597,00	252.553.407.686,00
Jumlah Arus Masuk Kas		261.756.973.597,00	252.553.407.686,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		261.756.973.597,00	252.553.407.686,00
Jumlah Arus Keluar Kas		261.756.973.597,00	252.553.407.686,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non Anggaran		-	-
Kenaikan/Penurunan Kas		-6.013.498.597,05	-141.731.367.897,18
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		168.894.470.516,82	310.625.838.414,00
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		120.300.829.248,00	136.581.587.009,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	62.771.509,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		32.926.509.387,77	31.764.289.060,82
Saldo Akhir Kas Di Bendahara kapitasi		-	-
Saldo Akhir Kas Di Bendahara BOS		9.653.633.284,00	485.822.938,00
Saldo Akhir Kas		162.880.971.919,77	168.894.470.516,82

Pjs. BUPATI KARAWANG,



YERRY YANUAR

Lampiran VII.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor : 4 Tahun 2020

Tanggal : 13 November 2020

KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	No. Ref	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
PENDAPATAN	4.1.1	4.830.299.290.668,00	4.678.932.470.058,25	96,87	4.188.371.977.756,82
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1.1.1	1.359.135.747.661,00	1.356.319.882.910,25	99,79	1.169.569.261.195,82
Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1.1.1	962.350.487.000,00	992.374.452.913,00	103,12	807.639.206.642,00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.1.1.2	103.820.093.450,00	69.020.343.168,00	66,48	73.896.811.403,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	4.1.1.1.3	6.448.099.105,00	7.261.152.768,00	112,61	5.144.443.726,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.1.1.1.4	286.517.068.106,00	287.663.934.061,25	100,4	282.888.799.424,82
PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2	3.203.918.343.007,00	3.055.525.727.163,00	95,37	2.777.409.496.739,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	4.1.1.2.1	2.262.590.416.700,00	2.138.791.255.642,00	94,53	2.048.785.689.308,00
Dana Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.1.1	234.215.648.000,00	164.053.668.705,00	70,04	210.865.030.191,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.1.1.2.1.2	153.965.033.000,00	140.470.470.900,00	91,24	100.907.470.582,00
Dana Alokasi Umum	4.1.1.2.1.3	1.325.136.134.000,00	1.325.136.134.000,00	100	1.245.521.327.000,00
Dana Alokasi Khusus	4.1.1.2.1.4	549.273.601.700,00	509.130.982.037,00	92,69	491.491.861.535,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.1.1.2.2	399.746.876.000,00	396.177.256.880,00	99,11	306.698.448.400,00
Dana Otonomi Khusus		0	0	0	0
Dana Penyesuaian	4.1.1.2.2.1	399.746.876.000,00	396.177.256.880,00	99,11	306.698.448.400,00
Transfer Pemerintah Provinsi	4.1.1.2.3	421.957.797.737,00	440.764.037.891,00	104,46	398.404.339.403,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.3.1	421.957.797.737,00	440.764.037.891,00	104,46	398.404.339.403,00
Pendapatan Bagi Hasil lainnya	4.1.1.2.3.2	0	0	0	0
Bantuan Keuangan	4.1.1.2.4	119.623.252.570,00	79.793.176.750,00	66,7	23.521.019.628,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	4.1.1.2.4.1	119.623.252.570,00	79.793.176.750,00	66,7	23.521.019.628,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.1.1.3	267.245.200.000,00	267.086.859.985,00	99,94	241.393.219.822,00
Pendapatan Hibah	4.1.1.3.1	267.245.200.000,00	267.015.520.000,00	99,91	240.772.000.000,00
Pendapatan lainnya	4.1.1.3.2	-	71.339.985,00	0	621.219.822,00
BELANJA	4.1.2	4.987.193.761.183,82	4.672.945.968.655,30	93,7	4.315.267.288.954,00
BELANJA OPERASI	4.1.2.1	3.515.388.994.438,82	3.297.063.102.489,30	93,79	3.118.112.591.506,00
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	1.808.296.736.154,00	1.710.536.396.878,00	94,59	1.621.732.170.390,00
Belanja Barang	4.1.2.1.2	1.585.755.012.784,82	1.478.890.125.643,30	93,26	1.420.921.058.751,00
Belanja Hibah	4.1.2.1.3	69.113.075.000,00	67.210.609.468,00	97,25	47.712.096.365,00
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.4	50.511.200.000,00	38.713.000.000,00	76,64	25.561.200.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	4.1.2.1.5	1.712.970.500,00	1.712.970.500,00	100	2.186.066.000,00
BELANJA MODAL	4.1.2.2	777.703.509.372,00	703.203.003.641,00	90,42	697.603.266.243,00
Belanja Tanah	4.1.2.2.1	5.977.524.500,00	5.350.288.500,00	89,51	19.377.347.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	172.393.798.979,00	150.699.843.213,00	87,42	97.215.835.048,00
Belanja Bangunan dan Gedung	4.1.2.2.3	293.582.533.099,00	251.737.666.643,00	85,75	234.824.020.329,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	286.672.100.950,00	276.742.284.873,00	96,54	329.682.831.724,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	19.077.551.844,00	18.672.920.412,00	97,88	16.503.231.342,00
Belanja Aset Lainnya		0	0	0	0
BELANJA TAK TERDUGA	4.1.2.3	1.338.848.503,00	0	0	807.070.100,00
Belanja Tak Terduga		1.338.848.503,00	0	0	807.070.100,00
TRANSFER	4.1.2.4	692.762.408.870,00	672.679.862.525,00	97,1	498.744.361.105,00
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA		692.762.408.870,00	672.679.862.525,00	97,1	498.744.361.105,00
Bagi Hasil Pajak		146.521.330.000,00	139.371.525.000,00	95,12	47.563.641.500,00
Bagi Hasil Retribusi		18.288.006.575,00	17.389.212.000,00	95,09	11.669.352.500,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		527.953.072.295,00	515.919.125.525,00	97,72	439.511.367.105,00
SURPLUS / (DEFISIT)		-156.894.470.515,82	5.986.501.402,95	-3,82	-126.895.311.197,18
PEMBIAYAAN	4.1.3				
PENERIMAAN DAERAH	4.1.3.1	168.894.470.515,82	168.894.470.516,82	100	310.625.838.414,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		168.894.470.515,82	168.894.470.516,82	100	310.625.838.414,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0	0	0	0

URAIAN	No. Ref	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
Penerimaan Piutang Daerah		0	0	0	0
Penjualan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0	0	0	0
PENGELUARAN DAERAH	4.1.3.2	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100	14.836.056.700,00
Pembentukan Dana Cadangan		0	0		0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100	14.836.056.700,00
Pembayaran Pokok Utang		0	0		0
PEMBIAYAAN NETTO		156.894.470.515,82	156.894.470.516,82	100	295.789.781.714,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0	162.880.971.919,77	0	168.894.470.516,82

Pjs. BUPATI KARAWANG,



YERRY YANUAR

**LAMPIRAN VIII. 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 4 Tahun 2020
Tanggal : 13 November 2020

1. TAHUN PERTAMA

**KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG
BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2019		JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 (Rp.)	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI TAHUN ANGGARAN 2020	
				APBD MURNI (Rp.)	PERUBAHAN APBD (Rp.)		APBD MURNI (Rp.)	PERUBAHAN APBD (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Karawang Kota	Kec. Karawang Barat	7.500.000.000	6.263.034.812	4.697.276.109	-	1.565.758.703
2	DINAS PUPR	Pembangunan Masjid Agung Karawang	Kec. Karawang Barat	6.415.716.000	449.100.120	5.966.615.880	-	449.100.120
3	DINAS PRKP	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal)		15.915.943.000,00	16.025.943.000,00	15.525.381.000		245.974.124,80
		a. Pembangunan sanitasi sekolah di SD Negeri Jomin Timur II	Desa Jomin Timur Kec. Kotabaru				-	58.122.046,80
		b. Pembangunan sanitasi sekolah di SD Negeri Kutapohaci II	Desa Kutapohaci Kec. Ciampel				-	97.077.078
		a. Pembangunan MCK di Dsn Krajan I RT.011/RW.006, Majelis Ta'lim Hidayatul Muhtadin	Desa Cikalong Wetan Kec. Cilamaya Wetan				-	90.775.000
Jumlah				29.831.659.000	22.738.077.932	26.189.272.989	-	2.260.832.947,80

BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR

LAMPIRAN VIII. 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 4 Tahun 2020
Tanggal : 13 November 2020

M. 2 TAHUN KEDUA

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (Rp)		JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2019		JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TA 2019 (Rp)	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp) TA 2020	
				APBD TA 2018	PERUBAHAN APBD TA 2018		APBD INDUK TA 2019	PERUBAHAN APBD TA 2019		APBD 2020	PERUBAHAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah				-	-	-	-	-	-	-	-



Pjs. BUPATI KARAWANG,
YERRY YANUAR

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 4 Tahun 2020
Tanggal : 13 November 2020

**KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PINJAMAN DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGA SI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGA SI	JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN	TUJUAN PENGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-					NIHIL			
Jumlah			-					NIHIL			

Pjs. BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR